

BAB 3

IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional

Identitas nasional pada hakikatnya merupakan “manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya” Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *Identity* yang memiliki pengertian harafiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau suatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam term antropologi identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada suatu kelompok. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (*collective action*) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Kata nasional sendiri tidak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme.

B. Unsur-unsur Identitas Nasional

Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentukan identitas yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa.

- 1) Suku bangsa : adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang mana coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa.
- 2) Agama : bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara namun sejak pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.
- 3) Kebudayaan, adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukung untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

- 4) Bahasa : merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia

Dari unsur-unsur Identitas nasional tersebut diatas dapat dirumuskan pembagiannya menjadi dua bagian sebagai berikut :

- 1) Identitas Fundamental; yaitu Pancasila yang merupakan falsafat bangsa, dasar negaram dan ideologi negara
- 2) Identitas instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata Perundang-undangan, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”

C. Faktor-faktor Pembentuk Identitas Nasional

a. Primordialisme

Katan kekerabatan (darah dan keluarga) dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa dan adat istiadat merupakan faktor-faktor primordial yang dapat membentuk bangsa-bangsa. Primordialisme tidak hanya menimbulkan pola perilaku yang sama, tetapi juga melahirkan persepsi yang sama tentang masyarakat negara yang dicita-citakan

Walaupun ikatan kekerabatan dan kesamaan budaya itu tidak menjamin terbentuknya suatu bangsa, karena mungkin ada factor yang lain yang lebih menonjol, namun kemajemukan secara budaya mempersukar pembentukan suatu nasionalisme baru (bangsabungsa) karena perbedaan ini akan melahirkan konflik nilai.

b. Keagamaan (Sakralitas Agama)

Kesamaan agama yang dipeluk oleh suatu masyarakat, atau ikatan *ideologi doktriner* yang kuat dalam suatu masyarakat merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa-negara. Ajaran-ajaran agama dan *ideologi doktriner* tidak menggambarkan semata-mata bagaimana seharusnya hidup (dalam hal ini cara hidup yang suci, agama menjanjikan surga, ideologi doktriner menjanjikan masyarakat tanpa kelas), karena menggambarkan cara hidup yang seharusnya dan tujuan suci. Walaupun kesamaan agama atau ideologi tidak menjamin bagi terbentuknya suatu bangsa-negara, sebagaimana ditunjukkan dengan kenyataan lebih dari sepuluh Negara Arab untuk Islam, puluhan negara Amerika Latin untuk Katholik, dan sejumlah negara komunis, namun faktor ini ikut menyumbangkan bagi terbentuknya *sat*u nasionalitas.

c. Pemimpin Bangsa

Kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara. Pemimpin ini menjadi panutan sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai "penyambung lidah" masyarakat. Berdasarkan masyarakat yang tengah membebaskan diri dari belenggu penjajahan,

biasanya muncul pemimpin yang kharismatik untuk menggerakkan massa rakyat mencapai kemerdekaannya. Kemudian pemimpin ini muncul sebagai simbol persatuan bangsa, seperti tokoh dwitunggal Soskarno-Hatta di Indonesia dan Joseph Bros Tito di Yugoslavia.

d. Sejarah Bangsa

Persepsi yang sama tentang asal-usul (nenek moyang) dan/atau persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti penderitaan yang sama yang disebabkan dengan penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas (sependeritaan dan sepenanggungan), tetapi juga tekad dan tujuan yang sama antar kelompok masyarakat.

Solidaritas, tekad, dan tujuan yang sama itu dapat menjadi identitas yang menyatukan mereka sebagai bangsa sebab hal-hal ini akan membentuk konsep ke-kita-an dalam masyarakat. Sejarah tentang asal-usul dan pengalaman masa lalu ini biasanya dirumuskan (cenderung didramatisasikan), dan disosialisasikan kepada seluruh anggota masyarakat melalui media massa (film dokumenter, film cerita, dan drama melalui televisi dan radio). Khusus bagi generasi baru, konsep sejarah ini disampaikan melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah dalam mata ajaran Sejarah Perjuangan Bangsa (Sejarah Nasional).

e. Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beraneka sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan semakin bervariasi kebutuhan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat saling bergantung di antara berbagai jenis pekerjaan. Setiap orang bergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin kuat suasana saling bergantung antaranggota masyarakat karena perkembangan ekonomi maka semakin besar pula solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Solidaritas yang ditimbulkan dengan perkembangan ekonomi itu disebutkan oleh pula sebagai solidaritas organis. Hal ini berlaku dalam masyarakat industri maju, seperti Eropa Barat, Jepang, dan Amerika Utara.

D. Parameter Identitas Nasional

Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat dan teknologi, sesuatu yang alami atau ciri yang sudah terbentuk seperti geografis.

Sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan mencari ciri atau identitas nasional biasanya mempunyai indikator sebagai berikut :

1. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-harinya. Identitas ini menyangkut adat istiadat, tatakelakuan, dan kebiasaan. Ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat-istiadat dan tata kelakuan.
2. Lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Lambang-lambang negara ini biasanya

dinyatakan dalam undang-undang seperti Garuda Pancasila, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan.

3. Alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini seperti bangunan yang merupakan tempat ibadah (borobudur, prambanan, masjid dan gereja), peralatan manusia (pakaian adat, teknologi bercocok tanam), dan teknologi (pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain).
4. Tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa. Identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu, seperti di Indonesia dikenal dengan bulu tangkis.

E. Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional.

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu negara dengan negara yang lain menjadi semakin tinggi. Dengan demikian kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat transnasional menjadi semakin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain terkait dengan masalah narkoba, pencucian uang (*money laundering*), peredaran dokumen keimigrasian palsu dan terorisme. Masalah-masalah tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi mulai memudar. Hal ini ditunjukkan dengan semakin merajalelanya peredaran narkoba dan psiktropika sehingga sangat merusak kepribadian dan moral bangsa khususnya bagi generasi penerus bangsa. Jika hal tersebut tidak dapat dibendung maka akan mengganggu terhadap ketahanan nasional di segala aspek kehidupan bahkan akan menyebabkan lunturnya nilai-nilai identitas nasional.

F. Integrasi Nasional Indonesia dan Identitas Nasional

Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mewujudkannya diperlukan keadilan, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa dan sebagainya. Sebenarnya upaya membangun keadilan, kesatuan dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik disamping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen.

Dengan demikian upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu terus dilakukan agar terwujud integrasi Bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu karena pada hakekatnya integrasi nasional tidak lain menunjukkan tingkat kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan. Pada akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman dan tentram. Jika melihat konflik yang terjadi di Aceh, Ambon, Kalimantan Barat dan Papua merupakan cermin dan belum terwujudnya Integrasi Nasional yang diharapkan. Sedangkan kaitannya dengan Identitas Nasional adalah bahwa adanya integrasi nasional dapat menguatkan akar dari Identitas Nasional yang sedang dibangun.

Tinjauan Historikal Wawasan Kebangsaan

A. Karakteristik Indonesia dan Peranan Sejarah Islam dalam Proses Integrasi

Kondisi geografis kepulauan Indonesia merupakan salah satu factor yang paling sulit dalam membentuk kesatuan Nusantara. Kesulitan itu akan bertambah besar dengan keanekaragaman suku bangsa yang memiliki adatistiadat dan bahasa ber beda yang tinggal di pulau-pulau yang terpisah itu. Oleh karena itu, makna integ rasi bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang paling penting.

Dalam peta terlihat bahwa wilayah Indonesia terdiri dari kepulauan besar dan kecil yang jumlahnya belasan ribu. Banyak di antara pulau-pulau tersebut dipisahkan oleh selat dan laut yang jaraknya ratusan bahkan ribuan kilometer. Misalnya, jarak antara Pulau Sumatra dan Sulawesi, Maluku dan Papua, lebih dari 2000 km. Begitu juga jarak antara Kepulauan Nusa Tenggara di selatan dan Kepulauan Sangir Talaud di ujung paling utara lebih dari 2000 km. Pulaupulau besar dan kecil tersebut dihuni oleh berbagai suku bangsa yang masingmasing memiliki keragaman etnis dan budaya.

Dalam konsep integrasi, laut-laut dan selat yang berada di wilayah Indonesia merupakan penyatu. Demikian pula keragaman suku-suku bangsa, budaya, dan bahasa yang secara alami telah mengalami proses evolusi sejak migrasi bangsa Austronesia ribuan tahun yang lalu. Terintegrasinya kepulauan yang tersebar di garis khatulistiwa dan memiliki keragaman budaya daerah, bahasa, dan bentuk fisik tersebut menuju kesatuan politis merupakan proses yang sulit dan panjang. Untuk itu diperlukan keinginan, tekad, dan upaya suku-suku bangsa yang tinggal di kepulauan tersebut.

Mengapa Islam yang berkembang di Indonesia menjadi faktor yang mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia? Jawaban terhadap pertanyaan ter sebut dapat dilihat secara etis, kultural, historis, dan ideologis. Secara etis, ajaran Islam tidak mengakui adanya perbedaan golongan dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa etika Islam bersifat demokratis karena agama Islam tidak mengenal strata sosial. Bagi penganut Islam, semua orang yang menganut Islam dianggap sebagai saudara dan memiliki kedudukan yang sama. Cara pandang seperti ini dipraktekkan oleh para pedagang Islam di seluruh Nusantara, dalam pergaulan di kota-kota pelabuhan Nusantara. Di kota-kota dagang penting Nusantara, seperti Malaka, Pasai, Banten, Cirebon, Tuban, Demak, Makassar, Ambon, dan lain-lain terjadi hubungan yang egaliter (berada dalam posisi yang sama). Misalnya, para pedagang yang berada di Malaka, Banten, dan lain-lain menganggap para pedagang Islam yang berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa Indonesia sebagai saudara. Terjadilah keterikatan di antara mereka dan perasaan sebagai saudara. Perbedaan-perbedaan latar belakang suku, adat-istiadat, bahasa, tradisi, dan lain-lain menjadi tidak begitu penting karena semuanya merasa berada dalam satu pandangan dan kedudukan yang sama. Mereka merasa bersatu karena pandangan mereka yang sama tersebut.

Dari persamaan pandangan mengenai etika sosial tersebut terdapat dua hal yang dipengaruhinya. Pertama, perdagangan di antara orang-orang Islam berkembang dengan pesat. Seperti dijelaskan pada Bab 5, masuknya Islam ke Indonesia terjadi melalui proses perdagangan. Dengan adanya perdagangan tersebut selain Islam

menyebar di Nusantara, perdagangan di kepulauan ini pun ikut berkembang pesat. Faktor etika sosial yang dianut para pedagang Nusantara berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan ekonomi dagang. Kedua, adanya pandangan tersebut telah mendorong terciptanya perasaan terintegrasi di antara para pedagang penganut Islam yang memiliki latar belakang berbeda-beda tersebut. Tampaknya dalam kegiatan dagang, factor perbedaan etnis, budaya, bahasa, dan lain-lain diabaikan. Mereka beranggapan bahwa yang terpenting adalah keuntungan. Keuntungan tersebut harus dinikmati bersama-sama di antara mereka yang menganut agama yang sama.

Budaya Islam atau kultural Islam mendukung terbentuknya sikap dan pandangan yang integral. Para pedagang Islam dan penganut Islam di Indonesia pada awal perkembangannya tidak memusuhi penganut kepercayaan lain.

Secara kultural (budaya), pemeluk Islam di Indonesia tidak mempertentangkan ajaran Islam dengan adat-istiadat atau kepercayaan yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Sebagian besar wali yang menyebarkan Islam di Jawa menggunakan pendekatan budaya setempat untuk menyebarkan Islam. Para wali dan ulama penganut ajaran tasawwuf berpandangan bahwa para penganut ajaran lain harus tetap dihormati. Mereka berpandangan bahwa pemeluk kepercayaan lain harus didekati dengan metode yang paling bisa diterima oleh mereka.

Dilihat dari awal perkembangan Islam di Indonesia, tampaknya perbedaan kepercayaan, tradisi, dan adat istiadat bukan merupakan factor disintegrasi. Sikap para pedagang, penyebar Islam, dan penganut Islam Indonesia yang akomodatif terhadap perbedaan pandangan, adat-istiadat, dan kepercayaan setempat yang telah lebih dulu dianut menyebabkan tidak terjadinya konflik budaya. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia tidak menimbulkan benturan-benturan budaya antara budaya Islam dan budaya setempat. Seperti telah diuraikan pada modul terdahulu adanya sikap akomodatif tersebut dapat mempercepat terjadinya akulturasi dan melahirkan kebudayaan khas Indonesia. Sikap toleransi pemeluk Islam terhadap pemeluk kepercayaan lain menjadi salah satu faktor yang membantu terjadinya proses integrasi bangsa.

Hasil akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal Indonesia baik dalam bentuk gagasan maupun bentuk fisik telah melahirkan identitas baru di kalangan pemeluk Islam di Indonesia. Ternyata, kebudayaan Islam (bukan sebagai ajaran agama) di Indonesia berbeda dengan kebudayaan Islam di negara-negara Islam lain. Kekhasan dan persamaan kebudayaan Islam Indonesia yang dianut oleh suku-suku bangsa Indonesia menciptakan perasaan bersatu di antara pemeluk-pemeluknya. Dengan demikian, hasil akulturasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses integrasi bangsa.

Sikap toleransi dalam aspek budaya dapat juga dilihat dalam praktek perdagangan. Para pedagang Islam berpandangan bahwa mereka bisa berdagang dengan siapa pun tanpa melihat latar belakang agama. Secara cultural para pedagang Islam memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan suku bangsa, agama, dan golongan dalam kegiatan dagang. Misalnya, para pedagang Islam di Malaka, Banten, Makassar, dan lain-lain bukan hanya berdagang dengan pedagang Islam dari Arab, Persia, Gujarat melainkan dengan para pedagang non-Islam dari Cina, Champa, dan lain-lain. Jadi secara historis, walaupun perdagangan abad ke-14 sampai 17 didominasi para pedagang

Islam, mereka bersedia berdagang dengan siapa pun tanpa melihat perbedaan latar belakang bangsa dan agama.

Para pedagang Nusantara awalnya tidak menentang bangsa asing yang berdagang di perairan Indonesia. Namun pada perkembangan sejarah berikutnya, para pedagang Nusantara berubah sikap. Mereka menyadari bahwa sikap terbuka tersebut ternyata telah disalahgunakan oleh para pedagang Barat yang ingin menguasai sumber barang dagangan. Para pedagang Nusantara melihat bahwa para pedagang Barat tersebut berambisi untuk menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Jatuhnya Malaka ke tangan bangsa Portugis (1511) adalah bukti adanya pemaksaan kehendak pedagang Barat dalam menguasai wilayah dagang di Nusantara.

Peristiwa jatuhnya pelabuhan Malaka tersebut merupakan awal perubahan sikap pedagang Nusantara. Sejak peristiwa itu, para pedagang Nusantara mulai berhati-hati dengan pedagang asing terutama dari Barat (Eropa). Para pedagang Islam mulai menyadari bahwa datangnya para pedagang Portugis di kepulauan Nusantara bukan hanya ingin berdagang, tetapi memiliki tujuan politis ingin menghancurkan kekuatan Islam. Mengapa bangsa Portugis ingin menghancurkan kekuatan Islam? Sejak zaman kejayaan Islam yang ditandai dengan adanya ekspansi kekuasaan

Dinasti Umayyah di Kordoba, menimbulkan benih-benih permusuhan dari bangsa Portugis terhadap kekuatan Islam. Ternyata penaklukan Jazirah Iberia (wilayah bangsa Portugis dan Spanyol) oleh dinasti Islam Umayyah abad ke-7 M dan disusul dengan kekuasaan Islam atas wilayah Eropa lainnya sampai abad ke-15, serta jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, ke tangan kerajaan Islam Turki Usmania tahun 1453, menimbulkan kebencian bangsa Eropa terhadap kekuatan Islam yang pernah menaklukkannya. Bangsa Portugis dan Spanyol yang secara historis pernah dikuasai oleh orang-orang Islam ingin membalas dendam terhadap penaklukan tersebut.

Tujuan ini diperkuat oleh ambisi mengejar kejayaan dan menguasai sumber perdagangan rempah-rempah. Mereka berusaha untuk menjelajah dunia dan menguasai jalur dagang internasional yang pada umumnya dikuasai oleh para pedagang Islam. Dengan ambisi tersebut, satu per satu kekuatan Islam diperangi dan pelabuhan-pelabuhannya diduduki. Setelah berhasil melalui pantai barat, selatan, dan timur Afrika, mereka sampai ke Samudra Hindia dan bertemu dengan pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan sepanjang jalur tersebut. Akhirnya, mereka sampai di Malaka dan berhasil menaklukkan dan menguasai pelabuhan itu tahun 1511. Berhasil merebut Malaka, bangsa Portugis terus berusaha menaklukkan kekuatan-kekuatan Islam lainnya di Nusantara, antara lain Pelabuhan Banten dan Ambon, Maluku. Tindakan bangsa Portugis tersebut disusul oleh bangsa Belanda yang memiliki ambisi yang kurang lebih sama. Bangsa Belanda pun berusaha untuk menguasai sumber penghasil rempah-rempah dan pelabuhan-pelabuhan penting kerajaan Islam Nusantara. Dengan politik disintegrasinya (*divide et impera*), satu per satu pelabuhan-pelabuhan penting Nusantara, seperti Sunda Kalapa, Ambon, Makassar, Demak, Cirebon, dan lain-lain dikuasainya.

Peranan Islam dalam proses integrasi telah dipengaruhi oleh perkembangan historis di atas. Berdasarkan perkembangan tersebut, para pedagang Islam serta kerajaan-kerajaan Islam Nusantara melihat bahwa kedatangan orang-orang Barat bukan hanya untuk berdagang melainkan juga untuk menaklukkan kekuasaan Islam di Nusantara.

Mereka mulai sadar bahwa kekuatan asing telah menyalahgunakan keterbukaan sikap pedagang Islam dan keterbukaan laut Nusantara. Dari perkembangan historis tersebut terdapat dua hal penting yang diakibatkannya. Pertama, peranan pedagang Islam di Laut Nusantara mengalami kemunduran karena para pedagang asing (Barat) mulai memonopoli perdagangan di kawasan tersebut.

Kedua, Islam telah dijadikan sebagai satu kekuatan ideologis untuk melawan kekuatan asing. Latar belakang historis datangnya bangsa Barat dengan misinya tersebut telah menyatukan kerajaan-kerajaan Islam secara ideologis untuk menghadapi Barat. Walaupun mereka tidak bersatu secara politis, terdapat kesamaan pandangan bahwa kekuatan asing tersebut akan menghancurkan kekuatan Islam. Oleh karena itu, Islam harus digunakan sebagai satu kekuatan ideologis untuk mengusir penjajah. Pandangan yang sama secara ideologis di antara kerajaan-kerajaan Islam Nusantara tersebut menempatkan Islam sebagai faktor yang mempercepat proses integrasi.

Dalam sejarah Indonesia, Islam telah digunakan sebagai kekuatan ideologis untuk menyatukan semua unsur perlawanan terhadap kekuatan kolonialisme Barat. Perlawanan daerah-daerah di Indonesia terhadap kekuatan Belanda pada abad ke-19 merupakan bukti bahwa Islam telah digunakan sebagai kekuatan ideologis. Para pemimpin perlawanan di daerah yang pada umumnya karismatis dan memiliki pengetahuan agama Islam yang tinggi memanfaatkan kekuatan ideologis tersebut yang telah dianut masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Dengan kekuatan tersebut, semangat untuk mengusir penjajah semakin besar. Rakyat yang ber ada di bawah pemimpin karismatis percaya bahwa Belanda adalah kafir, penjajah yang zalim, dan musuh Islam.

Dengan semangat perang sabil, perlawanan di daerah abad ke-19 merupakan perang yang melemahkan kekuatan militer pemerintah kolonial Belanda. Contoh-contoh bahwa Islam telah digunakan sebagai kekuatan ideologis dapat dilihat dalam Perang Saparua (1817), Perang Padri (1819- 1832), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Banjarmasin (1852, 1859, 1862), Perang Aceh (1873-1912), dan perlawanan petani Banten (1888). Walaupun perang-perang tersebut masih bersifat kedaerahan, secara historis dapat dikatakan bahwa perang yang dilandasi oleh kekuatan ideologis Islam itu telah menjadi dasar bagi lahirnya nasionalisme Indonesia pada awal abad ke- 20.

Dari uraian di atas terlihat bahwa secara etis, sosial-budaya, ideologis, dan historis, Islam memiliki peran yang besar dalam proses integrasi bangsa. Gerakan nasionalisme atau gerakan kebangsaan Indonesia awal abad ke-20 sebenarnya dasar-dasarnya telah diletakkan sejak tumbuh dan berkembangnya penganut serta kekuatan politik Islam di Nusantara sejak abad ke-16.

B. Pelayaran dan Perdagangan Menuju Terbentuknya Wawasan Kebangsaan

Pelayaran dan perdagangan antarpulau di kawasan Nusantara memiliki peran penting dalam proses integrasi bangsa Indonesia. Peranan tersebut dapat dilihat pada tiga hal penting. *Pertama*, pelayaran dan perdagangan antarpulau telah menghubungkan penduduk satu pulau dengan lainnya. *Kedua*, melalui pelayaran dan perdagangan antarpulau terjadi proses percampuran dan penyebaran budaya satu daerah terhadap daerah lainnya. *Ketiga*, dengan pelayaran dan perdagangan antarpulau proses integrasi bangsa mengalami percepatan.

Dengan adanya pelayaran dan perdagangan antarpulau terjadilah hubungan antarpenduduk satu pulau dan pulau lainnya. Penduduk di ujung Nusantara bagian timur bisa berhubungan dengan penduduk yang tinggal di ujung Nusantara bagian Barat. Penduduk yang tinggal di kota-kota pelabuhan pulau-pulau Nusantara sebelah selatan, seperti Jawa dan Nusa Tenggara bisa berhubungan dengan penduduk yang berada di kota-kota pelabuhan Nusantara bagian utara, seperti Aceh, Malaka, Makassar, dan lain-lain.

Dalam pelayaran dan perdagangan tersebut laut memegang peranan yang sangat penting. Laut digunakan sebagai jalan bebas hambatan yang bisa digunakan oleh penduduk setiap pulau. Dengan demikian, laut Nusantara dan selat-selat yang memisahkan pulau-pulau tersebut bukan merupakan pemisah atau pembatas penduduk yang tinggal di satu pulau dengan penduduk yang tinggal di pulau lainnya. Laut merupakan jalan penghubung sekaligus sebagai pemersatu penduduk yang tinggal di kepulauan Nusantara. Hubungan pelayaran dan perdagangan antarpulau yang sangat ramai pada abad ke-15-16 sebenarnya telah dirintis sejak zaman prasejarah dan diteruskan oleh zaman kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha.

Walaupun tidak diketahui dengan pasti bagaimana pelayaran zaman prasejarah, kedatangan bangsa Austronesia ke kepulauan Nusantara bukan melalui darat, karena sejak 4000 tahun yang lalu kepulauan Nusantara sudah terpisah dari daratan Asia. Diduga bahwa kedatangan bangsa tersebut menggunakan jalur laut. Dengan demikian sejak zaman prasejarah, bangsa Indonesia memiliki tradisi bahari, yaitu tradisi kehidupan masyarakat yang menggunakan laut sebagai sarana kehidupan.

Dengan masuknya pengaruh Islam, pelayaran dan perdagangan Nusantara mengalami kejayaan. Pada zaman ini terjadi hubungan antara penghasil barang dagangan dan pusat-pusat penjualan barang dagangan. Kotakota pelabuhan Nusantara menjadi pusat pertemuan pedagang yang datang dari berbagai pulau dan memiliki latar belakang budaya berbeda-beda.

Pedagang Islam di kawasan Nusantara bagian barat bukan hanya berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara di sebelah barat melainkan juga ke timur. Demikian juga sebaliknya. Para pedagang dari Ambon, Ternate, Tidore, Makassar, Banjarmasin, dan lain-lain berlayar serta berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara Barat, seperti Pasai, Malaka, Banten, Sunda Kalapa, Gresik, dan lain-lain. Para pedagang Jawa yang berdagang di Banten memperoleh barang dagangan berupa rempah-rempah dari Maluku. Begitu juga para pedagang dari Ternate, Tidore, dan Makassar mengangkut beras dari Jawa dan menjualnya di pelabuhan Nusantara Timur.

Masuknya Kolonialisme Barat sejak abad ke-16 telah menimbulkan solidaritas dan persamaan di antara para pedagang Nusantara. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511, sebagian kegiatan perdagangan Nusantara dialihkan ke Aceh, Banten, Makassar, dan Gresik. Di kotakota tersebut, seperti halnya di Malaka sebelum 1511, terjadi pertemuan antar berbagai suku bangsa. Dari pertemuan tersebut, terjadilah pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan adat-istiadat yang berbeda-beda. Dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, dan kemudian Belanda terjadi hubungan yang lebih erat di antara para pedagang Nusantara. Eratnya hubungan tersebut dibuktikan dengan semakin ramainya pelabuhan-pelabuhan Nusantara setelah peristiwa 1511 tersebut. Tampak dengan adanya monopoli perdagangan Portugis di Malaka menyebabkan solidaritas pedagang Nusantara lebih meningkat. Semakin

ramainya pelabuhan-pelabuhan Nusantara, menunjukkan bahwa mereka lebih memilih berdagang dengan sesama suku bangsa yang berasal dari kepulauan yang sama.

Masuknya bangsa Barat (Eropa) di kawasan Nusantara yang memaksakan monopoli perdagangan berpengaruh terhadap proses integrasi bangsa sejak abad ke-16. Hal ini disebabkan dua faktor, yaitu sebagai berikut.

Pertama, melalui perdagangan antarpulau, pada zaman kejayaan Islam terjadi pertukaran budaya, pengalaman, dan pengetahuan yang berasal dari pedagang yang memiliki latar belakang etnis berbeda-beda tersebut. Mereka melihat bahwa terdapat persamaan di antara mereka, seperti agama yang dianut, budaya, bentuk fisik, dan warna kulit. Mereka melihat bahwa pedagang Nusantara tersebut memiliki persamaan. Peramaan tersebut semakin terasa setelah mereka bandingkan dengan agama, warna kulit, dan bentuk fisik pedagang Barat tersebut.

Kedua, adanya perasaan yang sama juga semakin meningkat setelah mereka sama-sama dirugikan oleh pendatang Barat tersebut melalui politik monopoli, pembatasan dan bentuk kekerasan serta kelicikan. Dengan demikian timbullah solidaritas di antara para pedagang Nusantara untuk menghadapi kekuatan pedagang asing tersebut. Walaupun secara politis hal itu tidak dibuktikan dalam tindakan perlawanan bersama, perasaan solidaritas telah memperkuat aspek ideologis atau moral bahwa monopoli, pemaksaan kehendak, dan kekerasan serta kelicikan pedagang Barat harus dilawan. Perkembangan historis dalam aspek pelayaran dan perdagangan tersebut berpengaruh terhadap proses integrasi bangsa.

Secara historis dapat dikatakan bahwa konsep bangsa ditandai dengan adanya persamaan hal budaya, sistem kepercayaan, adat-istiadat, dan kepentingan bersama. Para pedagang Nusantara memiliki kepentingan bersama untuk mengambil perannya kembali di bidang perdagangan setelah kejayaan mereka diruntuhkan oleh kelicikan dan monopoli dagang bangsa Eropa. Sikap fair (wajar) berupa persaingan bebas dan terbuka melalui laut Nusantara ternyata disalahgunakan oleh pedagang Barat. Sikap solidaritas sebagai satu bangsa timbul setelah mereka memiliki kepentingan bersama untuk menghadapi monopoli dan kelicikan pedagang asing tersebut. Walaupun secara politis baru terwujud dalam abad ke-20 (17 Agustus 1945), konsepsi bangsa yang terintegrasi sudah dirintis melalui perkembangan historis pelayaran dan perdagangan sejak abad ke-16.

C. Peranan Bahasa Melayu Dalam Proses Terbentuknya Wawasan Kebangsaan.

Bahasa Melayu memiliki peran yang besar dalam proses menuju integrasi bangsa Indonesia. Bahasa ini tumbuh dan berkembang sejalan dengan proses penyebaran Islam, migrasi suku bangsa Melayu dan pelayaran, serta perdagangan di Nusantara. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan antarsuku bangsa, sehingga menjadi lingua franca.

Mengapa bahasa Melayu tumbuh menjadi bahasa yang banyak digunakan oleh suku-suku bangsa Nusantara? Jawabannya terletak pada pertumbuhan budaya Melayu yang di dalamnya juga mencakup Bahasa Melayu yang kemudian menjadi lingua franca. Taufik Abdullah, sejarawan dan staf ahli LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), mengemukakan bahwa pertumbuhan budaya Melayu dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

- a. Perkembangan pelayaran dan perdagangan jarak jauh dan lokal yang perannya antara lain dimainkan oleh suku bangsa Melayu.
- b. Pengembaraan sarjana Melayu di daerah Melayu dan di luar daerah Melayu. Tradisi seperti ini menurut catatan Ibnu Batutah sudah dimulai pada abad ke-13. Setelah banyak sarjana Melayu yang beragama Islam tradisi pengembaraan tersebut dilakukan dalam rangka penyebaran Islam. Bahasa yang digunakannya tentu saja bahasa Melayu.
- c. Adanya arus perpindahan penduduk suku bangsa Melayu yang diperkirakan dimulai sejak abad ke-15. Mereka menyebar dari Sumatra, Asia Tenggara, berbagai daerah di Nusantara, dan Madagaskar. Melalui perpindahan penduduk tersebut, terjadilah penyebaran budaya dan bahasa Melayu ke wilayah-wilayah yang didatanginya.
- d. Adanya perkawinan antardinasti dan aliansi politik di Nusantara berpengaruh terhadap penyebaran budaya dan bahasa Melayu. Diperkirakan bahwa melalui perkawinan antardinasti berbudaya Melayu dan non-Melayu berpengaruh terhadap penyebaran budaya kedua belah pihak. Dalam hal ini, budaya Melayu mempengaruhi lingkungan keraton atau dinasti non-Melayu.

Ketika perdagangan Nusantara mengalami perkembangan pesat pada abad ke-15, bangsa Melayu yang telah tersebar di sebagian wilayah Nusantara mengambil perannya. Dalam kegiatan tersebut, mereka menggunakan bahasa Melayu dalam percakapan sehari-hari. Diperkirakan bahwa dengan peran aktif suku bangsa Melayu dalam perdagangan antarpelabuhan Nusantara menyebabkan kebudayaan dan bahasa Melayu menyebar di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Begitu dominannya bahasa tersebut dipergunakan di kota-kota pelabuhan, seperti Malaka, Pasai, Aceh, Banten, Banjarmasin, Gresik, Makassar, dan lain-lain mendorong suku-suku bangsa lain yang berdagang di kota-kota pelabuhan tersebut mempelajarinya dan menggunakannya.

Tampaknya sikap pedagang Nusantara yang berpikir praktis dalam melakukan kegiatannya menyebabkan "terpilihnya" Bahasa Melayu sebagai bahasa dalam transaksi dagang. Para pedagang Nusantara menyadari bahwamereka berasal dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Untuk memperlancar komunikasi dalam perjanjian dagang, penentuan harga, dan jenis barang diperlukan bahasa yang paling banyak dikenal dan digunakan oleh penduduk di kota-kota pelabuhan. Dengan menggunakan bahasa yang sama, para pedagang bisa membeli dan menjual barangnya dengan mudah. Selain faktor kepraktisan di atas, digunakannya bahasa Melayu dalam komunikasi dagang dipengaruhi oleh sikap terbuka dan toleransi di antara para pedagang Nusantara. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, para pedagang Nusantara menyadari bahwa pemaksaan bahasa daerahnya masing-masing untuk dipergunakan oleh suku lainnya merupakan satu bentuk pemaksaan. Pemaksaan kehendak terhadap suku-suku lain akan menimbulkan konflik atau pertentangan. Digunakannya bahasa tersebut merupakan satu proses yang alamiah yang ditunjang oleh perkembangan budaya Melayu. Sebaliknya, suku-suku lain memilih bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan di antara mereka atas dasar kesadaran dan segi praktis semata untuk kelancaran kegiatan dagang mereka. Sikap terbuka yang dimiliki para pedagang tersebut merupakan landasan yang kuat bagi terintegrasinya suku-suku bangsa Indonesia.

Dilihat dari perspektif integrasi, digunakannya satu bahasa untuk berkomunikasi antarsuku bangsa yang berbeda-beda memungkinkan terjadinya penyebaran budaya yang satu dan lainnya. Dengan digunakannya bahasa yang sama, pengenalan budaya yang berbeda-beda akan semakin intensif. Melalui komunikasi akan ditemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan adat-istiadat, tradisi atau kebiasaan hidup masing-masing suku bangsa. Unsurpersamaan budaya bisa dijadikan dasar untuk membentuk identitas yang sama atau penguat sebagai satu bangsa. Adapun perbedaannya bisa digunakan sebagai sarana untuk memperkaya budaya dan meningkatkan toleransi, pemahaman atas perbedaan-perbedaan itu. Dengan sikap toleransi, konflik yang menjurus ke arah disintegrasi atau perpecahan bisa dihindari.

Melalui perkembangan sejarah, akhirnya bahasa Melayu digunakan oleh organisasi pergerakan nasional pada awal abad ke-20. Bahasa ini menjadi cikal bakal Bahasa Indonesia. Dengan digunakannya bahasa yang sama, cita-cita politik mengintegrasikan untuk seluruh bangsa bisa diwujudkan dalam bahasa politik yang sama. Akhirnya, integrasi bahasa secara politis benar-benar diwujudkan dalam pernyataan politik Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928: menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia, selain menyatakan bertanah air dan berbangsa satu, Bangsa Indonesia.

D. Mobilitas Penduduk Menuju Integrasi bangsa.

Terbentuknya wawasan kebangsaan serta proses integrasi bangsa Indonesia dipengaruhi pula oleh mobilitas penduduknya atau migrasi. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Migrasi memungkinkan terjadinya persebaran penduduk satu daerah ke daerah lain di kepulauan Nusantara.

Dalam menuju integrasi bangsa, mobilitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting. Karakteristik etnis atau suku-suku bangsa Indonesia yang dibentuk oleh lingkungan geografisnya berupa pulau-pulau yang terpisah menyebabkan satu pulau diidentikkan atau disamakan dengan satu identitas atau lebih budaya etnis. Misalnya, Pulau Sumatra identik dengan suku bangsa Melayu, Pulau Jawa identik dengan suku Jawa, Pulau Bali identik dengan suku Bali, Sulawesi identik dengan Bugis dan Makassar, Maluku dan Irian identik dengan Melanesia. Dalam perkembangan sejarah Indonesia, sejak abad ke-16 dapat dilihat bahwa keeksklusifan atau kekhususan pulau-pulau Nusantara dengan etnis tertentu tersebut sangat mudah dipecah-belah oleh kekuatan kolonial yang ingin menguasai pulau-pulau tersebut. Kekuatan asing telah melihat bahwa karakteristik tersebut merupakan faktor yang memperlemah bangsa Indonesia, dan oleh karena itu bisa dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk politik disintegrasi.

Melalui migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu pulau ke pulau lain, setiap pulau di Indonesia dihuni oleh berbagai golongan suku bangsa. Proses migrasi tersebut berpengaruh positif terhadap integrasi bangsa. Dengan mobilitas penduduk itu, pada akhirnya setiap pulau di kepulauan Nusantara akan dihuni oleh berbagai golongan etnis dan memungkinkan terjadinya akulturasi budaya di antara mereka.

Proses migrasi suku-suku bangsa Indonesia berkembang sejalan dengan proses historis bangsa itu. Dalam hal ini migrasi bangsa Melayu merupakan yang paling penting. Dari catatan yang dikemukakan oleh Taufik Abdullah sebelumnya dapat dilihat bahwa suku bangsa Melayu telah bermigrasi ke Semenanjung Malaka, Filipina

Selatan, Pantai Kalimantan Barat dan Selatan, Sunda Kalapa, dan kepulauan Indonesia lainnya. Pengaruh positif dari migrasi suku bangsa tersebut adalah tersebarnya budaya dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kemudian digunakan sebagai bahasa pergaulan bukan hanya antarsuku Melayu yang bertempat tinggal di pulau-pulau berbeda-beda melainkan juga oleh suku-suku bangsa non-Melayu.

Ramainya perdagangan Nusantara abad ke-15-16 dan perkembangan politik kerajaan-kerajaan Islam Nusantara berpengaruh terhadap adanya migrasi penduduk di Nusantara. Dalam hal pertama, para pedagang Islam Nusantara memegang peranan penting. Mereka bermukim di kota-kota pelabuhan yang jaraknya jauh dari pulau tempat mereka berasal. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai golongan migran pedagang. Misalnya pedagang dari Makassar, Bugis, Ambon, Gresik, Melayu, Malaka, dan Jawa memiliki permukiman di kota pelabuhan Banten.

Sejak abad ke-15, kota-kota pelabuhan Nusantara menjadi tempat berkumpul dan bermukimnya pedagang yang memiliki latar belakang budaya berbeda-beda. Banyak di antara mereka yang kemudian bertempat tinggal menetap dan bercampur dengan penduduk setempat. Walaupun tidak dicatat dalam sejarah mengenai jumlahnya, percampuran tersebut tetap berpengaruh positif terhadap proses integrasi antarsuku bangsa di Indonesia.

Perkembangan politik di Jawa abad ke-17 berpengaruh terhadap migrasi penduduk. Misalnya, pada masa berkuasanya Sultan Agung di Mataram (1613-1645) banyak penduduk Mataram yang tidak menyukai gaya nyebaran budaya yang satu dan lainnya. Dengan digunakannya bahasa yang sama, pengenalan budaya yang berbeda-beda akan semakin intensif. Melalui komunikasi akan ditemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan adat-istiadat, tradisi atau kebiasaan hidup masing-masing suku bangsa. Unsur persamaan budaya bisa dijadikan dasar untuk membentuk identitas yang sama atau penguat sebagai satu bangsa. Adapun perbedaannya bisa digunakan sebagai sarana untuk memperkaya budaya dan meningkatkan toleransi, pemahaman atas perbedaan-perbedaan itu. Dengan sikap toleransi, konflik yang menjurus ke arah disintegrasi atau perpecahan bisa dihindari.

Melalui perkembangan sejarah, akhirnya bahasa Melayu digunakan oleh organisasi pergerakan nasional pada awal abad ke-20. Bahasa ini menjadi cikal bakal Bahasa Indonesia. Dengan digunakannya bahasa yang sama, cita-cita politik mengintegrasikan untuk seluruh bangsa bisa diwujudkan dalam bahasa politik yang sama. Akhirnya, integrasi bahasa secara politis benar-benar diwujudkan dalam pernyataan politik Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928: menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia, selain menyatakan bertanah air dan berbangsa satu, Bangsa Indonesia.

D. Mobilitas Penduduk Menuju Integrasi bangsa.

Terbentuknya wawasan kebangsaan serta proses integrasi bangsa Indonesia dipengaruhi pula oleh mobilitas penduduknya atau migrasi. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Migrasi memungkinkan terjadinya persebaran penduduk satu daerah ke daerah lain di kepulauan Nusantara.

Dalam menuju integrasi bangsa, mobilitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting. Karakteristik etnis atau suku-suku bangsa Indonesia yang dibentuk oleh lingkungan geografisnya berupa pulau-pulau yang terpisah menyebabkan satu pulau diidentikkan atau disamakan dengan satu identitas atau lebih budaya etnis. Misalnya,

Pulau Sumatra identik dengan suku bangsa Melayu, Pulau Jawa identik dengan suku Jawa, Pulau Bali identik dengan suku Bali, Sulawesi identik dengan Bugis dan Makassar, Maluku dan Irian identik dengan Melanesia. Dalam perkembangan sejarah Indonesia, sejak abad ke-16 dapat dilihat bahwa keeksklusifan atau kekhususan pulau-pulau Nusantara dengan etnis tertentu tersebut sangat mudah dipecah-belah oleh kekuatan kolonial yang ingin menguasai pulau-pulau tersebut. Kekuatan asing telah melihat bahwa karakteristik tersebut merupakan faktor yang memperlemah bangsa Indonesia, dan oleh karena itu bisa dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk politik disintegrasi.

Melalui migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu pulau ke pulau lain, setiap pulau di Indonesia dihuni oleh berbagai golongan suku bangsa. Proses migrasi tersebut berpengaruh positif terhadap integrasi bangsa. Dengan mobilitas penduduk itu, pada akhirnya setiap pulau di kepulauan Nusantara akan dihuni oleh berbagai golongan etnis dan memungkinkan terjadinya akulturasi budaya di antara mereka.

Proses migrasi suku-suku bangsa Indonesia berkembang sejalan dengan proses historis bangsa itu. Dalam hal ini migrasi bangsa Melayu merupakan yang paling penting. Dari catatan yang dikemukakan oleh Taufik Abdullah sebelumnya dapat dilihat bahwa suku bangsa Melayu telah bermigrasi ke Semenanjung Malaka, Filipina Selatan, Pantai Kalimantan Barat dan Selatan, Sunda Kalapa, dan kepulauan Indonesia lainnya. Pengaruh positif dari migrasi suku bangsa tersebut adalah tersebarnya budaya dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kemudian digunakan sebagai bahasa pergaulan bukan hanya antarsuku Melayu yang bertempat tinggal di pulau-pulau berbeda-beda melainkan juga oleh suku-suku bangsa non-Melayu.

Ramainya perdagangan Nusantara abad ke-15-16 dan perkembangan politik kerajaan-kerajaan Islam Nusantara berpengaruh terhadap adanya migrasi penduduk di Nusantara. Dalam hal pertama, para pedagang Islam Nusantara memegang peranan penting. Mereka bermukim di kota-kota pelabuhan yang jaraknya jauh dari pulau tempat mereka berasal. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai golongan migran pedagang. Misalnya pedagang dari Makassar, Bugis, Ambon, Gresik, Melayu, Malaka, dan Jawa memiliki permukiman di kota pelabuhan Banten.

Sejak abad ke-15, kota-kota pelabuhan Nusantara menjadi tempat berkumpul dan bermukimnya pedagang yang memiliki latar belakang budaya berbeda-beda. Banyak di antara mereka yang kemudian bertempat tinggal menetap dan bercampur dengan penduduk setempat. Walaupun tidak dicatat dalam sejarah mengenai jumlahnya, percampuran tersebut tetap berpengaruh positif terhadap proses integrasi antarsuku bangsa di Indonesia.

Perkembangan politik di Jawa abad ke-17 berpengaruh terhadap migrasi penduduk. Misalnya, pada masa berkuasanya Sultan Agung di Mataram (1613-1645) banyak penduduk Mataram yang tidak menyukai gaya kepemimpinannya, sehingga menjadi mengungsi ke daerah lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Rakyat Madura yang tidak mau tunduk pada penguasa Mataram, memohon perlindungan pada Sultan Banten. Kemudian Mereka bermukim dan menetap di Banten.

- 2) Sebagian pasukan Mataram yang gagal menyerang Batavia 1629, banyak yang melarikan diri ke kerajaan Islam Banten dan menjadi warga Banten.
- 3) Petani dari Jawa Tengah yang tidak mau membayar pajak ke Sultan Mataram. Mereka melarikan diri ke pesisir utara Jawa Barat. Mereka mencari lahan subur di daerah Karawang, Indramayu, dan Cirebon untuk bersawah.

Perkembangan ini diikuti oleh tindakan Sultan Agung yang kemudian mengirimkan petani-petani nya ke daerah itu dalam rangka meningkatkan produksi beras. Para pelarian politik tersebut kemudian menetap di wilayah Jawa Barat dan bergaul dengan penduduk setempat. Sampai sekarang kebudayaan yang berkembang di daerah tersebut merupakan campuran kebudayaan Sunda dan Jawa. Mereka lebih senang disebut orang Banten, Cirebon, Indramayu daripada disebut orang Sunda atau Jawa.

Migrasi penduduk Indonesia pada abad ke-19 banyak mendapat pengaruh dari perkembangan politik dan ekonomi pada abad itu. Ketika pemerintah kolonial Belanda memberlakukan sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel* (1830-1870), banyak penduduk Jawa yang dipindahkan ke Sumatra. Mereka dipekerjakan di pusat-pusat perkebunan sebagai kuli kontrak. Mereka dibayar oleh pemerintah dengan upah yang rendah. Meskipun demikian, mereka terus bekerja di tempat tersebut dan menjadi pemukim tetap sampai melahirkan generasi berikutnya.

Tahun 1870 banyak dibuka usaha perkebunan swasta terutama di Sumatra dan Jawa. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, pemilik perkebunan mendatangkan buruh dalam jumlah besar dari daerah yang padat penduduknya. Perkembangan ini mendorong penduduk dari Jawa secara sukarela bermigrasi ke pusat-pusat perkebunan lainnya terutama di Sumatra.

Mereka disebut kelompok migran ke pusat perkebunan. Sampai akhir abad ke-19, penduduk Jawa telah menyebar di Lampung, Sumatra Utara, Kalimantan, dan daerah lainnya di luar Jawa. Akibat dari perkembangan itu adalah komposisi etnis di daerah-daerah tersebut sudah lebih majemuk dibandingkan dengan sebelumnya. Di beberapa daerah yang semula hanya dihuni oleh etnis tertentu menjadi multietnis. Misalnya, daerah Lampung telah dihuni oleh etnis Lampung, Jawa, Sunda, serta Melayu. Kalimantan Barat telah dihuni oleh etnis Melayu, Daya, Madura, Jawa, dan Cina. Jadi, dapat dikatakan bahwa karena perkembangan dan daya tarik ekonomi, suatu daerah di Indonesia bisa dihuni oleh berbagai etnis. Kondisi tersebut berpengaruh positif terhadap proses integrasi, apabila di antara mereka mengadakan hubungan yang terbuka satu dengan lainnya.

Dengan adanya hubungan yang saling terbuka di antara berbagai etnis yang tinggal di daerah tertentu akan terjadi percampuran budaya (akulturasi) dan fisik (perkawinan). Dengan cara seperti itu akan lahir identitas budaya baru yang menjadi milik bersama. Percampuran tersebut akan mengarah kepada proses integrasi bangsa. Migrasi penduduk daerah-daerah di Indonesia ke pusat-pusat pendidikan, walaupun jumlahnya kecil, ternyata berpengaruh paling besar terhadap proses integrasi bangsa. Sejak pemerintah kolonial membuka sekolah-sekolah untuk golongan Belanda, Indo, dan Bumi Putra (pribumi) di kota-kota besar Nusantara abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi migrasi penduduk dari berbagai daerah di Nusantara ke kota-kota tersebut. Kemudian kota-kota tersebut menjadi pusat bermukimnya golongan terdidik yang berasal dari berbagai daerah. Sekolah-sekolah guru di Bandung, Malang, Surabaya,

dan Medan dimasuki oleh pelajar pribumi dari kalangan bangsawan daerah di Indonesia.

Begitu juga dengan sekolah pertanian di Bogor, kedokteran di Jakarta, teknik di Bandung menjadi tempat untuk melahirkan golongan terdidik yang berpandangan integral tentang kebangsaan Indonesia. Golongan migrant terdidik di perkotaan, seperti di **Batavia (Jakarta)**, Bandung atau Surabaya akhirnya menjadi pelopor dalam mengintegrasikan pandangan berbagai suku bangsa ke dalam wawasan kebangsaan.

Lahirnya organisasi-organisasi politik (**Sarikat Islam, Boedi Utomo, Indische Partij**, dan **lain-lain**) serta perkumpulan-perkumpulan pemuda daerah (**Jong Sumatra, Java, Maluku, Aceh, Pemuda Sekar Rukun**) di Jakarta pada awal abad ke-20 adalah sebagai bukti keberhasilan golongan migran terdidik dalam mengembangkan wawasan integral. Golongan tersebut telah meninggalkan pandangan sempit kedaerahan. Mereka mengembangkan pandangan baru yang lebih integral atau lebih terpadu berupa wawasan kebangsaan. Melalui pendidikan, pandangan mereka tentang diri dan lingkungan budayanya sudah lebih luas, dari pandangan kedaerahan ke pandangan nasional. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya migrasi golongan terdidik ini, proses integrasi menuju pada negara kesatuan dilakukan dengan pandangan-pandangan yang luas golongan terpelajar melalui perjuangan politik kebangsaan.

Dari faktor-faktor integrasi yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa proses integrasi menuju kesatuan bangsa, bahasa, dan Negara Indonesia merupakan proses yang panjang. Dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, akhirnya paham integralistik muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan kebangsaan (pergerakan nasional) yang berkembang pada awal abad ke-20 bukan merupakan gerakan yang dilandasi oleh paham yang muncul pada awal abad tersebut, melainkan dipengaruhi oleh proses integrasi yang terjadi sejak ratusan tahun yang lalu.

Perkembangan etis, kultural, historis, dan ideologis Islam pelayaran dan perdagangan Nusantara, bahasa Melayu, migrasi penduduk dan akultuasi budaya, dan lahirnya golongan terdidik merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya paham kebangsaan atau nasionalisme pada awal abad ke-20.

E. Belajar dari Pengalaman Sejarah Menuju Terbentuknya Wawasan Kebangsaan.

1) Pelajaran yang Harus Terus Dikaji

Mengkaji kembali perkembangan sejarah bangsa Indonesia abad ke-16- 19, banyak pelajaran dapat diambil oleh generasi sekarang. **Pertama**, integrasi suatu bangsa merupakan suatu proses historis yang panjang. Dengan demikian integrasi tidak dilakukan dalam satu atau dua kejadian sejarah melainkan terjadi dalam suatu proses yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kita merasa sebagai satu bangsa karena ada keterikatan budaya satu dengan lainnya, ada persamaan kepentingan, menggunakan bahasa yang sama, mengakui sistem nilai yang sama, ada persamaan identitas, dan adanya solidaritas sebagai satu bangsa yang sama.

Kedua, semakin sering terjadi hubungan atau komunikasi, kontak budaya, pergaulan antargolongan suku bangsa, agama dan tradisi daerah di Indonesia, maka akan

semakin baik terbentuknya identitas bangsa. Melalui komunikasi yang terbuka antarsuku bangsa, sikap prasangka, sentimen kesukuan atau kedaerahan lambat laun dapat dihilangkan. Dengan demikian, proses integrasi akan lebih cepat.

Ketiga, semakin terdidik suatu bangsa, semakin baik paham kebangsaan bangsa itu. Dalam hal ini pandangan sempit kedaerahan, kesukuan, agama, dan lain-lain bisa dihilangkan melalui pendidikan. Melalui pendidikan, cara pandang orang tentang diri dan lingkungannya akan meluas. Lingkungan hidup mereka bukan hanya daerah dan suku bangsa yang berada di sekitarnya melainkan juga daerah dan suku bangsa yang berada di luar lingkungan geografis mereka.

Keempat, dalam perkembangan proses integrasi terdapat faktor yang memperkuat dan faktor yang memperlemah. Faktor penguat telah diuraikan di atas. Adapun faktor yang dapat memperlemah integrasi meliputi, sikap primordialisme, kesukuan, kedaerahan, diskriminasi, kesenjangan sosialekonomi, kemiskinan, dan kebodohan, isolasi, masuknya paham asing yang negatif, eksklusifisme, fanatisme agama yang sempit, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan.

2) Faktor Disintegrasi yang Harus Diatasi

a). Primordialisme

Primordialisme adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan golongan berdasarkan identitas daerah, agama, ras, suku, atau golongannya. Secara etimologi, primordialisme berasal dari kata Latin *prima* atau *primus* yang artinya "yang utama." Primordialisme merupakan sikap atau pandangan yang sempit karena lebih mengutamakan identitas atau kepentingan daerah, suku, atau budaya lokalnya dibandingkan dengan kepentingan umum atau bangsa. Dengan demikian, pandangan primordialisme sering diartikan sebagai suatu paham kedaerahan, kesukuan, ras, fanatisme agama yang sempit, dan lain-lain.

Golongan masyarakat yang menganut paham primordialisme dalam pelaksanaannya biasanya akan melakukan diskriminasi sikap dan tindakan yang membedakan orang berdasarkan golongan, suku, ras, agama, dan lainnya. Dengan diskriminasi seperti itu, golongan, suku, ras, atau penganut agama yang samalah yang diutamakan terlebih dahulu, sedangkan golongan yang lain diabaikan atau dinomorduakan.

b). Kebodohan dan Isolasi

Kebodohan dan isolasi atau tertutupan adalah juga faktor-faktor yang menghambat integrasi. Masyarakat yang bodoh biasanya memiliki pandangan yang sempit. Mereka mengisolasi diri dalam lingkungan tempat tinggalnya. Mereka memandang dunia ini hanya terbatas pada lingkungan sosialnya. Di luar lingkungan sosial mereka adalah orang lain atau orang asing yang dipandang berbeda dengan mereka. Kondisi masyarakat seperti ini merupakan faktor penghambat integrasi karena akan sangat mudah dipecahpecah oleh golongan yang berniat untuk mengadakan perpecahan atau disintegrasi.

c). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi

Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi adalah faktor yang menghambat integrasi. Kesenjangan sosial ekonomi, baik kesenjangan antargolongan masyarakat ataupun kesenjangan antardaerah, adalah faktor yang memperlemah integrasi.

Apabila kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin ini terjadi kebetulan pada etnis atau golongan tertentu, yang muncul adalah sikap prasangka dan kecemburuan dari golongan yang miskin terhadap yang kaya. Apabila kebetulan yang miskin dan yang kaya tersebut berasal dari etnis atau suku yang berbeda, isu yang muncul ke permukaan adalah bukan masalah kesenjangan sosial-ekonominya melainkan soal etnis atau suku bangsa. Faktor ini bahkan jauh lebih buruk dibandingkan dengan faktor-faktor yang memperlemah di atas. Alasannya adalah karena aspek social ekonomi merupakan aspek yang paling mendasar yang berkaitan dengan kebutuhan manusia.

Gerakan disintegrasi yang terjadi di beberapa kawasan dunia, seperti di Eropa Timur, Uni Soviet, dan Yugoslavia dapat dijadikan sebagai contoh betapa faktor kesenjangan mempercepat disintegrasi bangsa. Walaupun dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, gerakan disintegrasi di kawasan tersebut memperlihatkan kuatnya kesenjangan sosial ekonomi dan kesenjangan daerah. Daerah-daerah yang miskin yang dihuni oleh etnis tertentu merasa didominasi oleh etnis lain yang berhasil dalam bidang ekonomi. Pertentangan antaretnis atau golongan di negara-negara tersebut menyebabkan terjadinya disintegrasi atau perpecahan.

Proses integrasi bangsa Indonesia yang dimulai sejak abad ke-16 sampai abad ke-19 dan diteruskan pada abad ke-20 melalui gerakan kebangsaan sebenarnya tidak berakhir sampai terbentuknya negara kesatuan RI, 17 Agustus 1945, melainkan terus berlanjut sampai sekarang. Selama proses tersebut, kedua faktor penguat dan penghambat terus berhadapan. Mengenai faktor mana yang lebih kuat mempengaruhi proses integrasi tersebut, bergantung bagaimana bangsa dan negara tersebut memperjuangkannya. Apabila faktor penguat itu terus dipelihara dan faktor penghambat terus dihilangkan, integrasi bangsa akan tetap terjaga.